



Laporan Riset

Membaca Hasil Pemilu Indonesia Tahun 2019

Mangihut Siregar*

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 1 April 2019

Direvisi 12 April 2019

Diterima 15 Mei 2019

Kata Kunci:

Pemilu

Polarisasi

Fanatisme

Kepentingan

Kebenaran

Abstrak

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia sudah berhasil melangsungkan beberapa kali pemilihan umum (Pemilu) yaitu, tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Setiap Pemilu selalu mengalami perubahan undang-undang (UU). Perubahan ini diakibatkan kelemahan yang masih terjadi dalam setiap UU tersebut dan juga pergantian pemenang Pemilu. Pergantian pemenang Pemilu mengakibatkan perubahan UU karena harus disesuaikan dengan kepentingan partainya dan juga koalisinya.

Pemilu tahun 2019 dikatakan Pemilu yang paling rumit di dunia. Dikatakan paling rumit karena Pemilu kali ini dilangsungkan secara serentak dalam satu hari untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota legislatif. Banyak pujian dari negara luar akan pelaksanaan Pemilu pada tanggal, 17 April 2019 yang berjalan dengan baik. Hasil Pemilu sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal, 23 Mei 2019. Untuk pemilihan presiden/wakil presiden dimenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan kemenangan 55,41%, dan untuk legislatif dimenangkan PDI-P sebesar 19,33%.

Kelompok yang menang menyambut baik hasil Pemilu dan mengatakan Pemilu 2019 berjalan sangat baik. Sebaliknya kelompok yang kalah menyebut, Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang terjelek selama reformasi. Penilaian ini didasari akan kepentingan kelompok masing-masing. Apabila sesuai dengan kepentingannya disebut kebenaran, sebaliknya apabila berbeda dengan kepentingan sangat jauh dari kebenaran. Kebenaran dinilai berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan fakta dan data.

© 2019 Komunitas Studi Kultural Indonesia. An1image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) Indonesia tahun 2019 merupakan Pemilu yang paling rumit di dunia. Dikatakan paling rumit karena Pemilu dilaksanakan secara serentak antara pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres) dengan pemilihan legislatif (Pileg) dalam satu hari.

Setiap pemilih akan memilih, presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat pusat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian setiap pemilih akan mendapatkan lima lembar kertas suara, kecuali di DKI Jakarta hanya mendapatkan empat kertas suara karena tidak memilih DPRD II.

* Peneliti koresponden: Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. *Mobile:* +62 813-3187-8434 *E-mail:* msiregar22@yahoo.com

Selain pelaksanaannya yang rumit, Pemilu kali ini menjadi Pemilu yang melelahkan karena jadwal kampanye yang begitu panjang. Calon presiden adalah orang yang sama pada Pemilu sebelumnya (2014) sehingga Pemilu tahun 2019 merupakan tanding ulang dan layak disebut menjadi *el clasico* dalam sepak bola. Calon presiden yang hanya 2 pasangan mengakibatkan terjadinya polarisasi yang begitu sengit di tengah masyarakat.

Hiruk-pikuk Pilpres yang hanya diikuti 2 pasangan calon sanggup menelan riuhan Caleg 7.968 orang yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal dari Aceh. Hingar bingar pesta menyisakan suka dan duka di tengah masyarakat.

2. Diskusi

Terlepas dari segala kekurangan Pemilu tanggal, 17 April 2019, negara Indonesia banyak mendapat pujian dari negara luar akan pelaksanaannya yang berjalan dengan aman dan lancar. Masyarakat melakukan kekuasaannya dengan cara memberikan suara di bilik suara. Pemberian suara ini menjadi kekuasaan tertinggi rakyat (*people power*).

Kekuasaan rakyat (*people power*) benar dirasakan masyarakat karena mereka bebas menjatuhkan pilihan yang sesuai dengan keinginannya. Masyarakat tidak dapat diintimidasi untuk memilih Caleg tertentu maupun Capres tertentu. Kebebasan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi setiap pemilih.

Pujian dari negara luar bukanlah tidak beralasan, karena selama masa kampanye, saat Pemilu, dan setelah Pemilu keamanan masyarakat relatif terkendali. Demikian juga pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan. Yang tidak kalah penting dari keberhasilan ini adalah tingkat partisipasi pemilih sampai 80 persen. Angka ini

merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia pasca-reformasi.

Keberhasilan Pemilu tahun 2019 merupakan kerja keras seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari: Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Partai Politik, terlebih rakyat yang sudah memberikan hak politiknya di bilik suara. Tanpa kerjasama yang baik, Pemilu 2019 tidak akan dapat berjalan dengan baik.

2.1 Pemilihan Presiden (Pilpres)

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Pilpres kali ini merupakan ulangan tahun 2014. Karena calon hanya 2 pasangan mengakibatkan terjadinya polarisasi yang sangat tajam di tengah masyarakat. Polarisasi ini dimulai pada saat Pilpres 2014, dilanjutkan dengan pemilihan gubernur di DKI Jakarta, dan puncaknya adalah Pilpres 2019.

Polarisasi yang sudah berlangsung lama mengakibatkan gesekan-gesekan yang terjadi di antara elit maupun di masyarakat umum. Setiap hari bertaburan berita *hoaks* dan juga kampanye hitam (*black campaign*).

Hoaks menjadi menu utama yang selalu tersaji di mana setiap orang mengabaikan data dan fakta. Orang percaya akan suatu informasi apabila menguntungkan kelompoknya. Fakta dan logika disesuaikan dengan keinginan sipembuat narasi.

Meminjam pendapat Haryatmoko [1], pada era *posttruth*, orang asal berbicara dan apa yang disampaikan itu tidak mencerminkan realitas. Bertolak dari pernyataan ini, kebenaran bukan lagi apa yang sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sudah terjadi melainkan bagaimana sesuatu itu sesuai dengan keinginan. Singkat kata sesuatu dikatakan benar apabila sesuai dengan keinginan.

Agar sesuatu informasi sesuai dengan keinginan, para agen mengonstruksinya dengan berbagai cara. Ada dengan cara *framing* ada juga dengan membuat *hoaks*. Cara yang paling cepat dan gampang adalah dengan memproduksi *hoaks*.

Peredaran *hoaks* yang begitu masif pada Pemilu 2019 dipengaruhi hasrat kekuasaan yang berlebihan. Seperti yang dikatakan Nugroho [2], peredaran *hoaks* bukan hanya disebabkan rendahnya literasi digital tetapi juga karena fanatisme politik berlebihan. Hal ini beralasan karena aktor yang memproduksi *hoaks* bukan hanya orang berpendidikan rendah, tetapi lebih didominasi orang-orang berpendidikan tinggi.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan Pemilu 2019, masyarakat Indonesia sudah berhasil melaksanakan Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Partisipasi pemilih yang tinggi yaitu 80 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) melampaui target yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pihak yang menang berkata, Pemilu 2019 berjalan sangat baik, adil, jujur sebaliknya pihak yang kalah menyatakan, Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang terjelek dalam sejarah republik Indonesia. Para kontestan melihat kebenaran bukan dari fakta dan data melainkan keinginan mereka. Apabila menguntungkan disebut kebenaran sebaliknya apabila merugikan berarti bukan kebenaran.

Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU sudah menetapkan rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan anggota legislatif. Penetapan ini lebih cepat satu hari dari batas akhir yang ditentukan oleh UU Pemilu 2019 paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara yaitu tanggal 22 Mei 2019.

Dari data rekapitulasi di 34 provinsi pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf

Amin mendapat 85.036.828 suara (55,41 persen), sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen) [3].

Hasil ini tidak jauh berbeda dari Pemilu presiden tahun 2014 di mana waktu itu Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen), sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen).

Demikian juga persebaran perolehan suara yang dimiliki kedua kontestan tahun 2019 hampir sama dengan hasil Pemilu presiden tahun 2014. Fanatisme pemilih terhadap calon tercermin dari hasil Pemilu selama dua periode. Pemilih menentukan pilihannya hampir sama pada tahun 2014 dengan tahun 2019. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 30 provinsi di antaranya posisi kemenangan kontestan tetap, hanya 4 provinsi yang mengalami perubahan.

Provinsi yang mengalami perubahan pemenang yaitu provinsi Bengkulu yang pada tahun 2014 pemenangnya Joko Widodo-Jusuf Kalla (54,73 persen), pada tahun 2019 pemenangnya adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (50,11 persen). Demikian juga provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2014 dimenangkan Joko Widodo (71,43 persen), tahun 2019 dimenangkan Prabowo Subianto (57,02 persen).

Hal yang sama juga terjadi di provinsi Jambi, tahun 2014 dimenangkan Joko Widodo (50,75 persen), namun di tahun 2019 pemenangnya adalah Prabowo Subianto (58,32 persen). Berbeda di provinsi Gorontalo, tahun 2014 dimenangkan Prabowo Subianto (63,10 persen), namun tahun 2019 dimenangkan Joko Widodo (51,73 persen).

Secara nasional persebaran suara di tiap provinsi dan jumlah perolehan suara pemilih presiden tidak jauh berbeda antara tahun 2014 dengan tahun 2019.

Pada tahun 2014 total suara sah 133.574.277. Dari total itu yang memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,85 persen dan memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla 53,15 persen.

Pada Pemilu Presiden tahun 2019, total suara sah 153.479.321. Suara yang memberi dukungan kepada Joko Widodo-Ma,ruf Amin 55,41 persen dan yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,59 persen.

Dari data ini terlihat bahwa hasil Pemilu Presiden tahun 2014 hampir sama dengan tahun 2019. Pergeseran dukungan hanya sekitar 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi pemilih terhadap kedua pasangan calon sangat fanatis. Sikap fanatisme ini mengakibatkan pertarungan yang sangat keras dan berubah menjadi sikap yang kasar.

Sikap fanatisme yang tinggi bahkan kadang sampai berlebihan mengakibatkan tim pemenangan melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak logis. Para kontestan yang tamak akan kekuasaan memberikan “*doping*” kepada timnya agar mempunyai tenaga lebih untuk memenangkan pertarungan. Hal yang sama juga diikuti para pendukung fanatismenya, segala cara dilakukan demi memenangkan pilihannya. Fanatisme menutupi etika dan logika.

2.2 Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pemilu tahun 2019 melakukan pemilihan secara langsung dan bersamaan antara presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II. Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah pemilihan DPR karena elektabilitas partai politik tercermin dari jumlah kursi yang dimiliki masing-masing partai politik di tingkat nasional.

Hasil rekapitulasi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 Mei 2019 [4], untuk

perolehan kursi partai politik di DPR dimenangkan PDI Perjuangan dengan perolehan 27.053.961 suara (19,33%).

Posisi berikutnya secara berurutan, Gerindra 17.594.839 suara (12,57%), Golkar 17.229.789 suara (12,31%), PKB 13.570.097 suara (9,69%), Nasdem 12.661.792 suara (9,05%), PKS 11.493.663 suara (8,21%), Demokrat 10.876.507 suara (7,77%), PAN 9.572.623 suara (6,84%), dan PPP 6.323.147 suara (4,52%).

Partai Hanura yang pada periode 2014 mengirimkan wakilnya sebanyak 16 kursi untuk duduk di DPR, tahun 2019 tidak berhak mengirimkan wakilnya karena tidak lolos dalam ambang batas (*parliamentary threshold*) yaitu minimal 4% yang ditetapkan undang-undang. Demikian juga partai-partai lainnya (Perindo, PSI, Berkarya, PBB, Garuda, PKPI) tidak lolos memenuhi ambang batas.

Dalam hal perolehan kursi, PDI-P mendapat 128 kursi, Gerindra 79 kursi, Golkar 84 kursi, PKB 58 kursi, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.

Ada suatu hal yang menarik dari Pemilu Legislatif ini di mana jumlah suara yang dimiliki suatu partai tidak selalu linier dengan jumlah kursi yang diperoleh secara nasional. Contoh ini terlihat dari Partai Gerindra dan PKS. Partai Gerindra mempunyai jumlah pemilih lebih banyak (12,57%) dari pada Partai Golkar (12,31), namun dalam jumlah kursi, Partai Golkar mempunyai lebih banyak (84 kursi) dan Gerindra (79 kursi), ada selisih 5 kursi.

Demikian juga PKS yang memiliki lebih banyak suara (8,21%) dari Demokrat (7,77%). Dalam perolehan kursi di DPR, Demokrat memiliki 54 kursi sedangkan PKS hanya memiliki 50 kursi. Hal yang sama juga

terjadi di PKB yang memiliki suara lebih banyak (9,69%) dari Nasdem (9,05) namun kursi Partai Nasdem lebih banyak dari Partai PKB. Hal ini bisa terjadi karena “harga kursi” di setiap daerah pemilihan tidak sama.

Pemilu 2019 menyisakan banyak luka baik dari segi sosial terlebih dalam hal agama. Polarisasi yang sangat tajam terjadi karena pilihan politik yang berbeda. Hubungan yang harmonis antara satu keluarga dan juga bertetangga menjadi hal yang sangat mahal disebabkan polarisasi pilihan yang berbeda.

Politik identitas menjadi senjata yang sering digunakan untuk mendulang suara. Demi mendapatkan suara, agama menjadi komoditi. Hal ini terjadi seperti yang dikatakan Azyumardi Azra [5] lebih karena darurat politik (*political contingency*) di kalangan umat Muslim yang ada di Indonesia daripada kebangkitan politik identitas secara *genuine* di kalangan arus utama.

Penduduk Indonesia yang lebih banyak menganut agama Islam tidak otomatis memberikan suaranya ke pada partai yang berasaskan Islam. Hal ini terbukti dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, pemenangnya adalah partai nasionalis. Partai yang berasaskan Islam yaitu PKS (8,21%) dan PPP (4,52) totalnya hanya (12,73%). Dari data ini jelas terlihat bahwa mayoritas umat Muslim memberikan suaranya ke partai nasionalis (berasaskan Pancasila).

Kegagalan partai-partai Islam untuk meraih suara yang signifikan sudah terjadi sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Ini menjadi bukti Islam Indonesia seperti yang dikatakan oleh Azyumardi Azra berkarakter *wasathiyah*. Islam Indonesia bersifat inklusif, akomodatif dan toleran. Politik identitas digunakan hanya dalam keadaan darurat.

Keberhasilan partai politik untuk meraih suara yang sebanyak-banyaknya dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang paling dominan yaitu mesin partai, usaha calon legislatif dan faktor efek ekor jas (*coattail effect*). Sistem Pemilu legislatif yang berlaku di Indonesia menganut sistem terbuka sehingga yang paling dominan untuk meraih suara adalah usaha para calon legislatif dan faktor ekor jas.

Pemilu 2019, partai politik yang mendapatkan efek ekor jas ada 5 partai yaitu, PDI-P, Nasdem, PKB, PKS dan Gerindra. PDI-P sangat merasakan efek ekor jas karena mendapatkan penambahan kursi yang sangat signifikan. Tahun 2014 PDI-P mendapat 109 kursi, tahun 2019 menjadi 128 kursi.

Walaupun Joko Widodo bukan pimpinan partai, namun dirinya merupakan asosiasi PDI-P. PDI-P tidak dapat dipisahkan dari Joko Widodo sebaliknya Joko Widodo tidak dapat dipisahkan dari PDI-P. kemenangan PDI-P lebih banyak dipengaruhi efek ekor jas dari Joko Widodo. Sementara kemenangan Joko Widodo juga ditentukan mesin partai PDI-P.

Partai Nasdem tidak mempunyai kader sebagai Capres maupun Cawapres, namun partai ini merupakan partai yang pertama mendeklarasikan untuk mendukung Joko Widodo sebagai Cawapres tahun 2019. Partai Nasdem sudah dua periode mendukung Joko Widodo (tahun 2014 dan tahun 2019). Partai Nasdem menjadi pendukung utama bersama partai koalisi lainnya dalam seluruh program presiden Joko Widodo selama periode 2014 -2019.

Hubungan yang begitu harmonis antara partai Nasdem dan Joko Widodo sehingga partai ini mendapat ekor jas dari Joko Widodo. Pada tahun 2014, Nasdem baru mendapat 35 kursi dan tahun 2019 menjadi 59 kursi. Angka ini sangat signifikan sehingga Nasdem menjadi

partai tengah secara nasional walaupun baru dua kali mengikuti Pemilu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat beruntung setelah diputuskan Ma'ruf Amin menjadi Cawapres mendampingi Joko Widodo. Ma'ruf Amin merupakan asosiasi PKB sekaligus tokoh Islam. Walaupun penentuan Cawapres sangat alot, namun setelah diputuskan menjadi Ma'ruf Amin berdampak positif ke PKB. Pada tahun 2014, PKB hanya mendapat 47 suara, pada tahun 2019 bertambah menjadi 58 suara.

Hal yang sama juga dialami PKS. Setelah resmi mengusung Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres, PKS mendapatkan efek ekor jas. Awalnya Sandiaga Uno merupakan kader Gerindra, namun setelah resmi menjadi Cawapres, Sandiaga Uno menjadi kader PKS.

Selain militansi pemilih PKS, efek ekor jas juga diperoleh partai ini. Pada tahun 2014, PKS hanya mendapat 40 kursi dan tahun 2019 menjadi 50 kursi. Penambahan 10 kursi merupakan pencapaian yang sangat signifikan.

Partai Gerindra identik dengan Prabowo Subianto. Hal ini sangat wajar karena Prabowo Subianto merupakan ketua umum partai tersebut. Selain itu, tokoh yang membidani kelahiran partai Gerindra adalah Prabowo Subianto.

Walaupun Prabowo Subianto menjadi Capres sekaligus ketua umum Gerindra, namun efek ekor jas ke partai Gerindra tidak begitu signifikan. Pada tahun 2014, partai Gerindra mendapat 73 kursi dan tahun 2019 mendapat 78 kursi. Dari hasil ini terlihat bahwa efek ekor jas Prabowo Subianto ke partainya kurang signifikan (hanya tambah 5 kursi).

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa elektabilitas partai politik bukan hanya ditentukan

satu faktor melainkan beberapa faktor. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh di antaranya, mesin partai, elektabilitas calon legislatif, efek ekor jas, dan sejenisnya.

2.3 Koalisi Pemerintahan Tahun 2019-2024

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Walaupun demikian untuk menjalankan pemerintahannya presiden harus mendapat dukungan dari parlemen. Sebaik apa pun program yang dicanangkan presiden apabila tidak didukung parlemen, maka program itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Melihat hasil Pemilu legislatif tahun 2019, partai-partai yang mencalonkan pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin yaitu, PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura. Karena Hanura tidak lolos ambang batas (*parliamentary threshold*) maka partai pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk periode 2019 - 2040 hanya lima partai politik.

Partai politik yang mencalonkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yaitu, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Keempat partai ini lolos ambang batas.

Dari hasil Pemilu yang sudah diumumkan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 terlihat untuk koalisi partai pendukung pemerintah: PDI-P 19,33%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,05%, dan PPP 4,52%. Apabila dijumlah maka suara yang mendukung pemerintah di parlemen 54,90%. Sementara partai oposisi: Gerindra 12,57%, PKS 8,21%, Demokrat 7,77% dan PAN 6,84%. Total seluruh partai oposisi 35,39%.

Dari hitungan angka-angka di atas partai pendukung pemerintah sudah mendominasi suara di parlemen.

Pemerintah tidak perlu “merekruit” partai oposisi untuk masuk ke organisasi partai pemerintah.

Walaupun demikian dalam politik dikenal adigium tak ada teman abadi dan tak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Oleh karena itu, dalam politik tidak ada lawan dan juga tidak ada kawan. Satu-satunya tolok ukur koalisi hanyalah kepentingan.

Melihat peta persebaran dukungan di parlemen, partai koalisi pemerintah sudah mendominasi kursi parlemen. Idealnya segala program yang direncanakan pemerintah akan berjalan mulus. Dalam politik bukanlah demikian, partai pendukung pemerintah bisa menjadi oposisi, dan sebaliknya partai oposisi di awal bisa menjadi pendukung pemerintah sejauh kebijakan yang diambil menguntungkan partainya.

Partai politik dijalankan bahkan dimiliki segelintir orang yang sering disebut elit politik. Elit politik seperti yang dikatakan Pareto [6] merupakan kelompok kecil yang berhasil menduduki jabatan tinggi. Kelompok ini berhasil menggabungkan kekuasaan dengan kelicikan.

Memerhatikan dukungan yang diberikan partai politik terhadap salah satu keputusan politik (baik Pilpres, Pileg, Pilkada, penetapan undang-undang, dan lain-lain) ditentukan oleh kepentingan partai politik. Keputusan partai politik ditentukan oleh elit politik. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam politik tidak ada kepentingan umum, yang ada adalah kepentingan kelompok. Lebih eksplisit kepentingan individu elit politik.

3. Kesimpulan

Pemilu tahun 2019 sudah selesai dan berjalan dengan baik. Hasil Pemilu sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019. Pihak yang menang

memberikan apresiasi akan Pemilu yang sudah selesai, sedangkan pihak yang kalah mengatakan Pemilu tahun 2019 yang paling jelek selama masa reformasi.

Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda. Sama halnya dengan politik, setiap orang dan setiap partai politik mempunyai kepentingan yang berbeda dengan orang lain atau partai politik lain. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan setiap partai politik menilai sesuatu kebijakan politik dari kaca mata kepentingan partainya.

Apabila keputusan politik sesuai dengan kepentingan partainya terlebih kepentingan elit dalam partai itu, maka keputusan itu menjadi suatu kebenaran. Sebaliknya, apabila keputusan itu bertentangan dengan partainya terlebih dengan elit partainya maka keputusan itu menjadi suatu kesalahan.

Kesesuaian dengan fakta dan data di lapangan tidak otomatis menjadi kebenaran dalam politik. Kebenaran hanya ditentukan oleh kesesuaian fakta dan data dengan kepentingan. Kepentingan menjadi pusat segala sesuatunya, sedangkan hal lainnya harus menyesuaikan ke pusat tersebut.

Referensi

- [1] Kompas. “Fanatisme Berlebihan Picu Peredaran Hoaks”. *Kompas*, Rabu, 12 Juni 2019, hal. 9 Kolom 1-4.
- [2] Kompas. “Media dan Masyarakat Perangi Hoaks”. *Kompas*, Selasa, 11 Juni 2019. Hal. 9, kolom 1-7.
- [3] Kompas. “Rekapitulasi Pemilu Tuntas”. *Kompas*, Selasa, 21 Mei 2019. Hal. 1, kolom 1-4.
- [4] Kompas. “Membaca Perolehan Kursi DPR”. *Kompas*, Rabu, 22 Mei 2019. Hal. 2, kolom 1-7.
- [5] Azra, Azyumardi. “Politik Pascapemilu”. *Kompas*, Kamis, 23 Mei 2019. Hal. 4, kolom 1-2.
- [6] Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.